

ANALISIS SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI SUMATERA BARAT (Studi kasus : PT Pupuk Sriwijaya Cabang Sumbar)

Widya Fitriana

Abstrak: *As the fertilizer scarcity is getting worst in West Sumatra in last few years, some critical question emerging from these phenomena, i.e.; how is the subsidized fertilizer distribution system?, what are the problem encounter in distributing subsidized fertilizer? This study tries to answer those question by focusing on the management of PT PUSRI branch office as well as its 5 marketing areas; Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, Agam, and Pasaman. The result shows that none of these five areas marketing unit could sell fertilizer at its ceiling price which was Rp 1.200/kg as of May 17, 2006. This was mainly because of high distribution cost shouldered by each marketing agent. Among the five marketing area unit, Pasaman is the most efficient one with a margin ratio of 2.32.*

Kata Kunci: *biaya distribusi, margin distribusi, rasio keuntungan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Industri pupuk merupakan salah satu industri strategis yang berperan penting dalam menunjang produksi pangan nasional. Dalam konteks sistem agribisnis, keberadaan industri ini dikenal sebagai industri hulu (*back stream agribusiness*) yang menyediakan input produksi bagi usaha tani. Ketersediaan pupuk secara tepat akan sangat menentukan keberhasilan produksi pertanian. Oleh karena itu sangat *urgent* untuk membangun sistem distribusi pupuk yang efisien sehingga ketersediaan pupuk dalam layanan 6T (tepat jenis, jumlah, mutu, harga, waktu, dan tempat) dapat dinikmati petani.

Menurut Cravens (1997) sistem distribusi merupakan bagian dari upaya untuk memasarkan produk yang dihasil-

kan oleh sebuah industri. Dengan sistem distribusi yang baik, pemasaran produk diharapkan dapat mencapai sasaran. Pendapat serupa tentang pentingnya membangun sistem distribusi produk yang efisien juga ditegaskan oleh Kotler dan Armstrong (1997) bahwa walaupun perusahaan sukses menciptakan produk yang berkualitas tinggi, dengan harga yang terjangkau dan promosi yang gencar, namun semuanya tidak akan berarti apa-apa apabila konsumen sulit untuk mendapatkan produk tersebut karena sistem distribusinya yang macet dan tidak efisien.

Perumusan Masalah

Munculnya kasus kelangkaan pupuk diberbagai daerah saat ini, terjadi hampir merata di daerah Jawa dan luar Pulau Jawa, tidak terkecuali Sumatera

Barat. Kelangkaan pupuk di Sumbar belakangan ini menyisakan sejumlah pertanyaan tentang sistem distribusi pupuk yang pelaksanaannya dipegang oleh PT Pusri sebagai satu-satunya distributor pupuk bersubsidi yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.26/MPP/Kep-1/1999. Mestinya krisis pupuk di Sumbar tidak terjadi, mengingat bahwa untuk tahun 2007 ini, kuota pupuk bersubsidi untuk wilayah Sumbar telah ditambah hingga 42,71%. Semula kuota pupuk urea bersubsidi untuk wilayah Sumbar hanya 96 ribu ton/tahun, namun sejak awal tahun 2007 ditingkatkan menjadi 137 ribu ton/tahun. Dengan penambahan kuota ini mestinya tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk di tingkat petani.

Berdasarkan informasi diatas maka persoalan mendasar dari kasus kelangkaan pupuk yang melanda Sumbar akhir-akhir ini perlu diteliti dari segi mekanisme sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar sehingga diharapkan subsidi pupuk benar-benar dapat dinikmati oleh petani sasaran.

Menurut Azzaino (1981) untuk mengetahui efisien atau tidaknya saluran distribusi, ada beberapa indikator yang dapat digunakan, yaitu :

1. Bagian yang diterima oleh produsen dan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Semakin kecil bagian ini, berarti semakin tidak efisien saluran distribusi yang digunakan.
2. Margin distribusi/pemasaran
Semakin tinggi margin distribusi/pemasaran, semakin tidak efisien saluran pemasaran/distribusi tersebut.
3. Biaya pemasaran yang dikeluarkan selama proses distribusi berlangsung
Jika biaya pemasaran/distribusi yang dikeluarkan oleh satu komoditi yang

sama lebih mahal, maka sistem pemasaran/distribusi produk tersebut tidak efisien

4. Rasio keuntungan dan biaya distribusi

Semakin besar nilai rasio, semakin tidak efisien saluran distribusi tersebut, sebab pedagang dengan biaya yang rendah mengambil keuntungan yang tinggi.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sbb:

1. Menganalisis sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar
2. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang realisasi sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar serta persoalan yang dihadapi dalam sistem distribusi tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan perusahaan terkait dalam merumuskan sistem distribusi pupuk yang ideal sehingga pemberian subsidi benar-benar dapat dinikmati oleh petani sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Pusri wilayah Sumbar yang berlokasi di Jalan Agus Salim No.4 Padang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena PT Pusri merupakan satu-satunya penyalur pupuk bersubsidi untuk wilayah Sumbar yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah berdasarkan pada SK Memperindag RI No.26/MPP/Kep.1/1999. Penelitian ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan sejak Maret – Oktober 2007.

Data yang dikumpulkan pada studi ini meliputi data primer dan data

sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan survei terhadap sistem distribusi pupuk di masing-masing lini distribusi hingga sampai ke lini akhir yaitu petani konsumen.

Pada Lini I dan Lini II, data diperoleh dari perusahaan sendiri selaku pelaksana distribusi. Wawancara dilakukan dengan karyawan yang menangani bidang penjualan pupuk yaitu Kasi penjualan dan Koordinator urusan penjualan yang membawahi 5 (lima) wilayah PPK (Pemasaran Pusri Kabupaten). Pada Lini III yaitu distribusi pupuk di tingkat KUD penyalur, dipilih KUD sampel secara acak yaitu sebesar 30% dari total KUD yang terdapat pada wilayah PPK sampel pada lini II. Pada Lini IV, yaitu distribusi pupuk di tingkat KUD pengecer, juga dipilih sampel secara acak sebesar 30% dari total sampel di Lini III.

Pengambilan sampel sebesar 30%, menurut Nazir (1998) telah dapat merepresentatifkan informasi yang diperoleh dari populasi secara keseluruhan. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari dinas atau instansi terkait.

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah :

1. Sistem distribusi pupuk

Mekanisme sistem distribusi pupuk

Berkaitan dengan aspek kuantum/ volume, kualitas, tempat, mutu, harga, serta kapasitas gudang penerima alat pengangkutan serta sarana dan fasilitas penunjang yang digunakan.

Margin distribusi/ pemasaran pupuk

- a. Harga di tingkat produsen (lini atas)
 $H_p = Rp/Kg$
- b. Biaya pemasaran/ distribusi
 $B = Rp/Kg$

- c. Keuntungan yang diambil oleh lini pemasaran
 $Jl = Rp/Kg$
- d. Harga di tingkat lini akhir (petani konsumen)
 $H_k = Rp/ Kg$

2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam proses distribusi pupuk

Masalah yang dihadapi dalam proses distribusi pupuk bersubsidi dilihat dari *supply* pupuk, waktu kedatangan pupuk, dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti sarana transportasi, kapasitas gudang penampung untuk masing-masing lini, dan volume penjualan yang dicapai.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Tujuan pertama dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis margin pemasaran/ distribusi. Secara matematis margin distribusi pupuk dapat dihitung dengan menggunakan formula sbb:

$$M = H_k - H_p \quad (\text{Azzaino, 1981})$$

Dimana :

- M = Margin pemasaran (Rp)
 Hk = Harga yang dibayarkan oleh konsumen lini (Rp/ Kg)
 Hp = Harga yang dibayarkan oleh produsen lini (Rp/ Kg)

Besarnya margin distribusi pupuk pada dasarnya merupakan penjumlahan dari biaya distribusi dan keuntungan yang diperoleh oleh lini distribusi. Secara matematis dapat dirumuskan sbb:

$$M = B + Jl \dots\dots\dots (\text{Azzaino, 1981})$$

Dimana :

- M = Margin pemasaran (Rp)
 B = Biaya Pemasaran (Rp/ Kg)
 Jl = Keuntungan yang diambil oleh lini distribusi (Rp/ Kg)

Persentase biaya distribusi dikeluarkan oleh lini distribusi pupuk, secara matematis dapat dirumuskan sbb:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Biaya Distribusi} \\ &= \frac{\text{Biaya Distribusi}}{\text{H arg a Konsumen Lini}} \times 100\% \\ & \hspace{15em} (\text{Swastha, 1993}) \end{aligned}$$

Persentase keuntungan yang diambil oleh lini distribusi pupuk, secara matematis dapat dirumuskan sbb:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase keuntungan} \\ &= \frac{\text{Keuntungan}}{\text{H arg a Konsumen Lini}} \times 100\% \\ & \hspace{15em} (\text{Stanton, 1996}) \end{aligned}$$

Rasio keuntungan dengan biaya pemasaran yang dikeluarkan secara matematis dapat dirumuskan sbb:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Keuntungan} \\ &= \frac{\text{Keuntungan}}{\text{Biaya Distribusi}} \dots \quad (\text{Soekartawi, 1993}) \end{aligned}$$

Tujuan kedua dianalisis secara kualitatif, dengan menggambarkan secara deskriptif mekanisme sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar serta persoalan/ kendala yang dihadapi dalam pendistribusian pupuk hingga mencapai lini akhir (petani konsumen)

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Pusri mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai ke Lini IV. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik (Palembang), Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah propinsi, Lini III

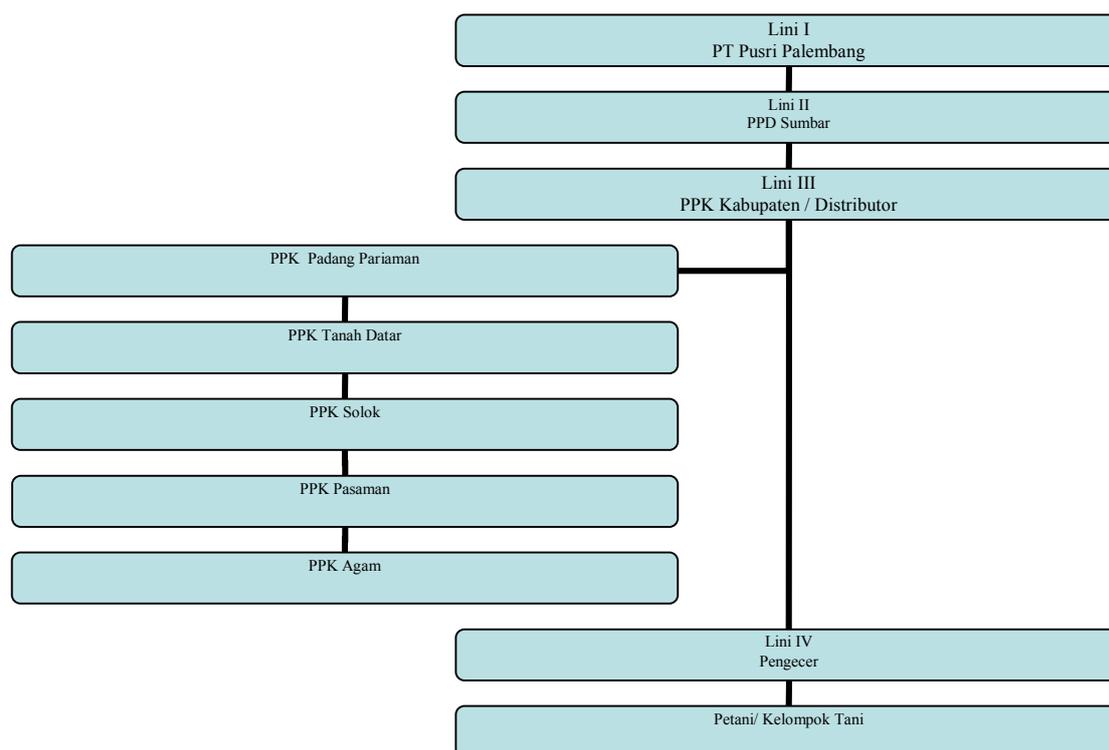
adalah lokasi gudang produsen/distributor di masing-masing wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh produsen, dan lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah kecamatan/desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.

PPD Sumbar memiliki 5 wilayah Pemasaran Pusri Kabupaten (PPK). Masing-masing PPK memiliki gudang di daerahnya masing-masing yang dikenal sebagai GPP (Gudang Pupuk Pusri) dan tiap-tiap gudang dikepalai oleh kepala gudang yang bertanggung jawab kepada kepala PPK di daerah tersebut.

Mekanisme Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi

Mekanisme sistem distribusi pupuk bersubsidi mulai dari produsen (Lini I) hingga sampai ke petani/ kelompok tani (Lini IV) terlihat pada Gambar-1.

Dari hasil wawancara dengan Kasie Penyediaan/ Penjualan PPD Sumbar, pengalokasian kebutuhan pupuk urea untuk seluruh Indonesia didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian No.66/Permentan/OT.140/12/2006, sedangkan di tingkat propinsi mengaju pada Peraturan Gubernur Sumbar No.12 tahun 2007. Namun temuan dilapangan menunjukkan banyak keluhan petani akan kelangkaan pupuk bersubsidi, di samping harganya yang cukup tinggi, antara Rp 1400/Kg-1700/Kg. Padahal HET yang ditetapkan adalah Rp 1200/Kg atau naik 14,29% dari HET per 1 Januari 2006. Di samping itu perbandingan antara rencana dan realisasi distribusi pupuk bersubsidi di masing-masing kabupaten tidak seimbang.



Gambar.1 Mekanisme Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi

Tabel-1 : Rencana dan Realisasi Distribusi (ton) Pupuk Bersubsidi di Sumbar Tahun 2006

No	Kabupaten	Rencana	Realisasi	Realisasi/ Rencana (%)
1	Pasaman	9.117	5.118	56.14
2	50 Kota	12.122	5.701	47.03
3	Agam	11.101	6.147	55.37
4	Tanah datar	9.298	8.076	86.86
5	Padang Pariaman	11.151	9.065	81.29
6	Solok	11.257	8.682	77.13
7	Sawah Lunto/ Sijunjung	5.146	1.460	28.37
8	Pesisir Selatan	11.799	2.631	22.29
9	Mentawai	105	0	0
10	Pasaman Barat	10.980	9.980	90.89
11	Solok Selatan	3.164	3.100	97.98
12	Dharmasraya	3.224	2.309	71.62
13	Kota Padang	2.675	2.146	80.23
	Jumlah	101.739	64.415	63.31

Sumber : Dipertahor Sumbar (2007)

Berdasarkan struktur biaya distribusi pupuk di masing-masing wilayah pemasaran PPK di 5 (lima) kabupaten terlihat bahwa biaya transportasi merupakan komponen biaya distribusi terbesar. Hampir lebih dari 60% biaya distribusi pupuk disebabkan karena biaya transportasi untuk mengangkut pupuk ke gudang distributor dan gudang pengecer. Bagi distributor dan pengecer yang

tidak memiliki kendaraan sendiri, biasanya menggunakan jasa ekspedisi untuk mengangkut pupuk ke gudang mereka, semakin jauh jarak ke gudang pembeli, maka semakin besar pula biaya transportasi yang harus mereka keluarkan.

Berikut adalah komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan pupuk mulai dari Lini-1 hingga ke Lini-IV (Dalam Rp/Kg)

Tabel-2 : Komponen Biaya Distribusi Pupuk di Masing-Masing PPK

No	Biaya Distribusi	Pemasaran Pusri Kabupaten (PPK)				
		PPK-1	PPK-2	PPK-3	PPK-4	PPK-5
1	Harga Jual PPD Sumbar	1.060	1.100	1.070	1.020	1.070
2	Total Biaya Distribusi Distributor	55	70	60	25	45
3	Pembelian pengecer	1.380	1.400	1.250	1.165	1.165
4	Total Biaya Distribusi pengecer	15	40	50	179.95	79.95
5	Harga konsumen	1.600	1.700	1.500	1.700	1.500
6	Total Biaya Distrubusi	70	110	110	204.95	305.05
7	Total Margin Distribusi	540	600	430	680	430
8	Rasio Keuntungan Distribusi	6.71	4.45	2.91	2.32	2.44

Keterangan:

PPK-1 : Padang Pariaman
 PPK-2 : Tanah Datar
 PPK-3 : Solok

PPK-4 : Pasaman
 PPK-5 : Agam

Hal yang menarik dari penelitian ini didapatkan bahwa, jika dilihat dari total margin distribusi maka PPK Pasaman menempati total margin terbesar dibandingkan keempat wilayah PPK lainnya yaitu mencapai sebesar Rp 680/kg, namun jika dilihat dari nilai rasio keuntungan terhadap biaya distribusi, justru wilayah PPK Pasaman inilah yang memiliki saluran pemasaran yang paling efisien dengan rasio keuntungan terkecil yaitu mencapai 2.32. Kendati

harga pupuk eceran di tingkat petani di daerah ini paling mahal dibandingkan daerah PPK lainnya, yaitu Rp 1.700/kg, namun demikian rasio keuntungan yang diambil oleh lembaga niaga justru paling kecil dibandingkan daerah PPK lainnya.

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar antara lain :

1. Besarnya biaya transportasi.

Lembaga niaga yang terlibat dalam distribusi pupuk mengeluhkan besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk mengangkut pupuk dari lini pembelian ke gudang mereka. Terlebih dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini menyebabkan harga jual mereka sulit untuk mencapai (sama) dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

2. Penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor kabupaten ke pengecer sering kali tidak tepat waktu.
3. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa lebih dari 60% responden mengalami jangka waktu keterlambatan penerimaan pupuk berkisar 1-2 minggu, 26.77% mengalami keterlambatan lebih dari 2 minggu, dan hanya 13.33% yang menerima pupuk tepat waktu.
4. Pengadaan dan penyaluran pupuk dari produsen ke distributor dan pengecer seringkali belum sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
5. Belum tepat harga.
Dari kelima wilayah PPK, ternyata tidak satupun yang mampu menerapkan harga jual sesuai dengan HET per 17 Mei 2006 yaitu sebesar Rp 1.200/Kg.
6. Penyusutan yang dialami selama proses bongkar muat dan pendistribusian pupuk (sekitar 3%), menyebabkan jumlah pupuk yang sampai ke pengecer lebih sedikit dari jumlah yang dibeli dari gudang distributor.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa sistem distribusi yang paling efisien terjadi pada wilayah PPK Pasaman dengan rasio keuntungan dis-

tribusi yang paling kecil dibandingkan keempat wilayah PPK lainnya yaitu sebesar Rp 2.32

2. Bahwa sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi adalah besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan, pendistribusian pupuk yang belum sesuai dengan prinsip 6T terutama belum tepat waktu, tepat jumlah dan tepat harga serta adanya biaya penyusutan akibat proses bongkar muat pupuk saat distribusi pupuk berlangsung.

Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Disarankan kepada PPD Sumatera Barat agar dapat mengontrol pasokan pupuk yang diterimanya dari Lini-1, agar sesuai dengan prinsip 6T yang menjadi slogan perusahaan ini dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu juga disarankan agar PPD dapat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap ketersediaan pupuk di Lini III dan IV.
2. Disarankan kepada distributor dan pengecer agar dapat melakukan pesanan pupuk ke PPD lebih awal sehingga resiko keterlambatan datangnya pupuk dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzaino, M. 1981. *Pengantar Tataniaga*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Cravens, David. 2001. *Pemasaran Strategis*. Erlangga. Jakarta.
- Darwis, Valeriana. 2004. *Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar. 2003. *Data Rayonisasi*

- Penyebaran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.70/MPP/Kep/2/2003*. Padang.
- Dipertahor Sumbar. 2007. *Rencana dan Realisasi Pupuk Subsidi Propinsi Sumbar Tahun 2006*. Padang.
- Kotler, Philip dan Amstrong, Gary. 1997. *Dasar-Dasar Pemesanan*. PT Prehelindo. Jakarta.
- Nazir. M. 1998. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- PT. Pusri. 1994. *Sejarah Tataniaga Pupuk*. <http://www.niaga.pusri.co.id>.
- Puradinata, S Djatnika. 2001. *Inovasi Melalui Teknologi Untuk Mengatasi kegagalan Pasar Dalam Sistem Industri Penunjang Pengadaan Pangan Nasional: Studi Kasus PT Pupuk Kujang*,. Tesis JBPTITBPP
- Soekartawi.1993. *Prinsip Dasar`Manajemen Pemasaran*. Erlangga. Jakarta.
- Swastha, Basu. 1993. *Azas-Azas Marketing*. Liberty. Yogyakarta.
1979. *Saluran Pemasaran*. GP FE UGM. Yogyakarta.